

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TENTANG PERAN BADAN PERWAKILAN
TIYUH DALAM PENETAPAN PERATURAN TIYUH**

**(Studi di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TENTANG PERAN BADAN PERWAKILAN
TIYUH DALAM PENETAPAN PERATURAN TIYUH**

**(Studi di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing 1: Dr. Liky Faizal., S. Sos, M.H.

Pembimbing 2: Rudi Santoso, SHI, MHI., MH.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021M**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Median YudhaPranata
NPM : 1721020232
Prodi : HukumTataNegara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Badan Perwakilan Tiuh Dalam Menetapkan Peraturan Tiuh (Studi Di Tiuh Panaragan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kecamatan Tulang Bawang Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 19 April 2021
Penyusun

Median YudhaPranata
NPM. 1721020232



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp: (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Badan Perwakilan
Tiyuh Dalam Menetapkan Peraturan Tiyuh (Studi Di Tiyuh
Pamaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten
Tulang Bawang Barat)”

Nama : Median Yudha Pranata

NPM : 1721020232

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas

Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Lity Paizal, S. Sos. M.H.

Rudi Santoso, S.H.I. MHL.MH

NIP. 197611042005011004.

NIP.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul **“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Badan Perwakilan Tiyyuh Dalam Menetapkan Peraturan Tiyyuh (Studi di Tiyyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung)”** disusun oleh Median Yudha Pranata, NPM 1721020232 Program Studi Hukum Tatanegara telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 8 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Dr. Liky Faizal., S. Sos, M.H.

Penguji Iii : Rudi Santoso, S.H.I., MHI., MH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pembagian Negara-negara muslim dengan berbagai potensi yang dimilikinya, baik sumberdaya alam (SDA), maupun sumberdaya manusia (SDM), seharusnya mampu membangun kekuatan ekonominya untuk kebaikan dan kemaslahatanumat. Negara-negara muslim segogyanya mampu mengembalikan prinsip dan misi islam sesungguhnya, yakni memerangi kemiskinan. Karena, Islam mengembalikan setiap individu untuk memperhatikan kesejahteraan. Pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, dibentuk Badan Perwakilan Tiyuh yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh dan keputusan kepala Tiyuh dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah Tiyuh dan memberdayakan masyarakat Tiyuh.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah, 1. Bagaimana Badan Perwakilan Desa Sebagai Lembaga Legislatif dalam Menetapkan Peraturan Tiyuh di Tiyuh Panaragan?, 2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Tentang Badan Perwakilan Tiyuh dalam Menetapkan Peraturan Tiyuh di Tiyuh Panaragan? Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data Primer diperoleh langsung dari responden mengenai Badan Perwakilan Tiyuh Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Menetapkan Peraturan Tiyuh di Tiyuh Panaragan, Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari perpustakaan dan dokumentasi. Sedangkan data tersier berasal dari internet, jurnal, artikel dan lainnya.

Hasil penelitian ini adalah badan perwakilan Tiyuh dalam pelaksanaan penetapan peraturan di Tiyuh kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan masyarakat Desa untuk melakukan musyawarah desa (Musdus) dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya BPT yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat dalam hal pelaksanaan penetapan peraturan di desa belum terlaksana secara demokratis di wilayah anggota badan perwakilan desa. Badan perwakilan desa dalam pelaksanaan penetapan peraturan di desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat tidak adanya musyawarah desa yang dilakukan badan perwakilan tiyuh dalam mengesahkan penetapan peraturan di tiyuh. Secara garis besar badan perwakilan tiyuh kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif badan perwakilan tiyuh di desa dalam ke ikut sertaan penetapan peraturan ditiyuh.

Kata Kunci: Aspirasi, Keinginan Masyarakat Tiyuh Untuk Keterbukaan Informasi Penetapan Peraturan di Tiyuh

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat,”
(QS. An-Nisa’: 58)



PERSEMBAHAN

Bismillaahirohmaanirrokhimm...

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhanku yang senantiasa memberikan kesempatan untuk berubah lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad saw, Panutanku yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat.

1. Cahaya hidupku Ibunda Yuli Yanti dan Ayahanda Kardi tersayang yang selalu memberi motivasi, baik materil maupun spiritual.
2. Adik Tersayang, Selpi Tiara Ariska, Serly Tri Astuti dan Karina Putrika Sari yang selalu memberi nasehat, semangat, motivasi yang tiada henti serta selalu memberikan semangat untuk terus maju.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Median Yudha Pranata adalah anak pertama dari 4 bersaudara, yang dilahirkan di Desa Buring Kencana pada tanggal 25 Januari 1998 dari pasangan Ibunda Yuli Yanti dan Ayahanda Kardi jenis kelamin Laki-laki bertempat tinggal di tiyuh Panaragan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar dimulai dari TK Ra Al Amin, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2004 dan menyelesaikannya pada tahun 2005. SDN 03 Semuli Raya, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2005 dan menyelesaikannya pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Panaragan Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2011 dan menyelesaikannya pada tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 01 Panaragan Jaya pada Tahun 2014 dan menyelesaikannya pada Tahun 2017. Kemudian melanjutkan pada tahun 2017 menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (IAIN) yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) pada Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tatanegara.



Bandar Lampung, April 2021
Penulis,

Median Yudha Pranata

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Adapun judul skripsi ini **“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Badan Perwakilan Tiuh Dalam Menetapkan Peraturan Tiuh (Studi Di Tiuh Panaragan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kecamatan Tulang Bawang Tengah)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum TataNegara pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Civitas Akademik Syari’ah.

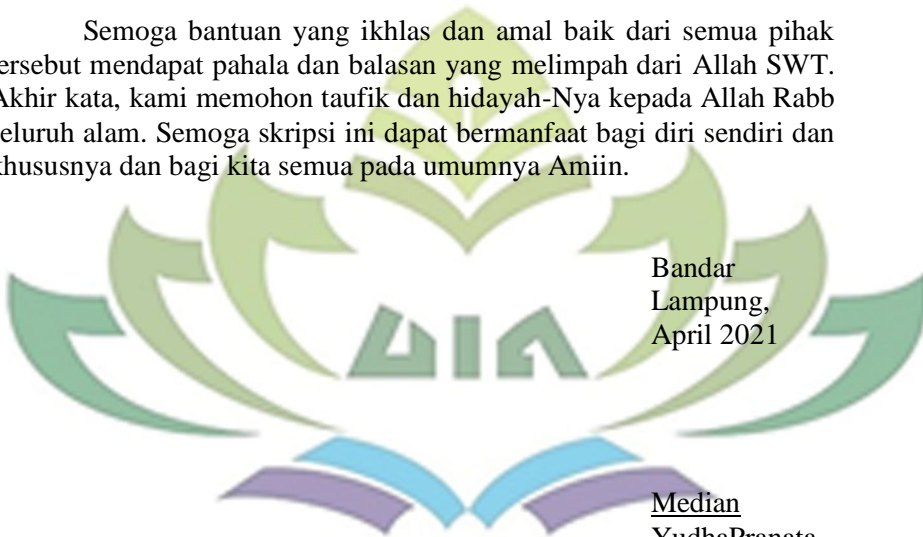
Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas do’a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1,2,3
2. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum TataNegara Fakultas Syari’ah Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Tim Penguji dalam sidang munaqosa akhir penulis.
4. Bapak Dr. Liky Faizal.,S.Sos, M.H. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Rudi Santoso, SHI., MHI., MH selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari’ah Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syaria,ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan jugaseluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Seseorang yang masih menjadi rahasia Allah Swt, yang kelak akan mendampingi dalam meraih kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya dan bagi kita semua pada umumnya Amiin.



Bandar
Lampung,
April 2021

Median
YudhaPranata
NPM.1721020
232

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah	19
1. Al-Sulṭah al-Tasyri'iyah.....	20
2. Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah.....	21
a. Konsep Imamah/Imam	21
b. Konsep Khalifah/Khilafah	28
c. Sistem Pemilihan Khalifah.....	32
d. Tugas dan Kewajiban Khalifah	33
e. Konsep Imarah/Amir	34
f. Wizarah/Wazir	34
3. Al-Sulṭah al-Qaḍā'iyah	37
B. Pemerintahan Desa	
1. Pengertian Pemerintahan Desa	39

2. Perangkat Desa	42
C. Fungsi Kepala Desa dan BPD	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Sejarah Singkat Panaragan	51
2. Kondisi Perekonomian	55
3. Kondisi Sarana Dan Prasarana	57
4. Pemerintahan Umum.....	59
5. Badan Permusyawaratan Tiyuh.....	61
6. Gambaran Pelayanan.....	62
B. Penyajian Fakta Dan Data Penelitian didesa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Data Penelitian	69
B. Temuan Penelitian.....	73

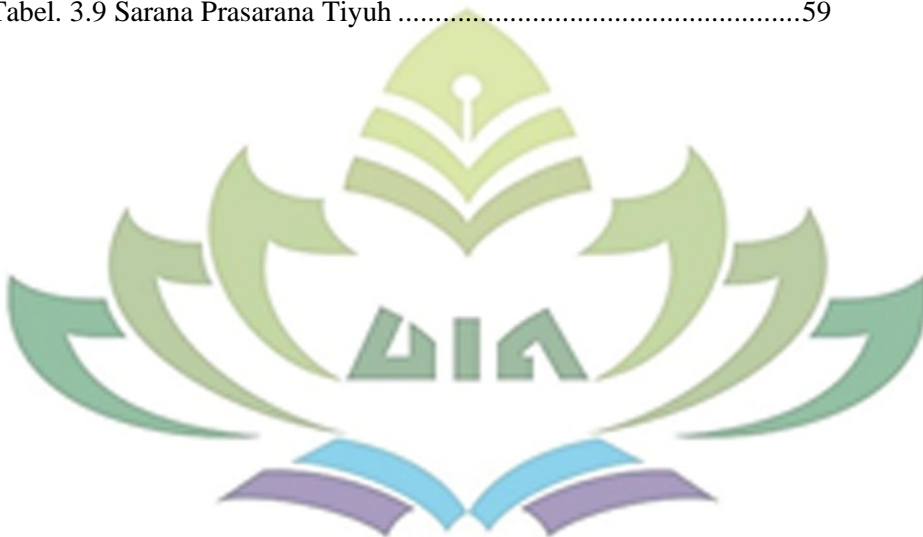
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	77

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel. 3.1Daftar Nama Kepala Desa Panaragan Dari Masa Kemasa...	54
Tabel. 3.2 Tata Guna Tanah	54
Tabel. 3.3 Jumlah Penduduk	56
Tabel. 3.4 Mata Pencanharian Penduduk Tiyuh Panaragan.....	56
Tabel. 3.5 Pendidikan Formal	57
Tabel. 3.6 Pendidikan Formal Keagamaan	58
Tabel. 3.7 Prasarana Kesehatan.....	58
Tabel. 3.8 Sarana Kesehatan	58
Tabel. 3.9 Sarana Prasarana Tiyuh	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar. 3.1 Struktur Pemerintah Desa Panaragan	60
Gambar. 3.2 Absensi BPD Tiyuh Panaragan	67
Gambar. 4.1 Absensi BPD Tiyuh Panaragan	67



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran. 1. Pedoman Teks Wawancara
- Lampiran. 2. Photo Wawancara Dengan Aparatur Desa Panaragan Dan Masyarakat Panaragan
- Lampiran. 3. Surat Izin Kesbangpol Tulang Bawang Barat
- Lampiran. 4. Surat Izin Pra Riset
- Lampiran. 5. Surat Izin Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Lampung





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahan, terlebih dahulu akan dijelaskan dari judul skripsi yaitu analisis *Fiqh Siyasah* tentang peran badan perwakilan tiyuh dalam menetapkan peraturan tiyuh, ada 4 istilah yang harus dijelaskan:

1. Analisis

- a. Analisis adalah sebuah kegiatan penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musahab, duduk perkarayanya).¹

- b. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan.

Berdasarkan ilmu yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008).

² Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008).

2. Peran Badan Perwakilan Tiyuh

- a. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.³ Peran juga biasanya bermakna berkombinasi dengan posisi dan pengaruh, dan juga disandingkan dengan fungsi, peran dan status juga adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan.⁴
- b. Badan perwakilan Tiyuh adalah jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak.⁵

3. Penetapan Peraturan Tiyuh

Penetapan peraturan tiyuh adalah kewenangan lokal berskala tiyuh menjadi kewenangan tiyuh melalui undang-undang dalam suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memecahkan masalahnya, melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasa*h Tentang Peran Badan Perwakilan Tiyuh Dalam Penetapan Peraturan Tiyuh” (Studi Di Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung).

³ kkbi, “Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi,” *Kkbi.Web.Id*, last modified 2008, accessed June 21, 2021, <https://kkbi.web.id/peranan>.

⁴ Rudi Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” *Jurnal Nizham* 7, no. 2 (2019): 255.

⁵ Mohammad Taufik Makarao Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

⁶ Lia Sartika, “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 164.

B. Latar Belakang Masalah

Negara-negara muslim dengan berbagai potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM), seharusnya mampu membangun kekuatan ekonominya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Negara-negara muslim segogyanya mampu mengembalikan prinsip dan misi islam sesungguhnya, yakni memerangi kemiskinan. Karena, Islam mengembalikan setiap individu untuk memperhatikan kesejahteraan.⁷

Pemerintahan tiyuh dalam rangka mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tiyuh, dibentuk Badan Perwakilan Tiyuh yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan tiyuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan kepala tiyuh dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah tiyuh dan memberdayakan masyarakat tiyuh.

Menurut Rozali Abdullah bahwa Badan Perwakilan tiyuh, selanjutnya disebut BPT adalah suatu badan yang berfungsi menetapkan peraturan tiyuh bersama kepala tiyuh. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tiyuh.⁸

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 7 Mei 1999. Hal ini berarti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah,

⁷ Akhmad Sobrun Jamil, ““Al-‘Adalah, Kesejahteraan Masyarakat Di Negara-Negara Islam,” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 6.

⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

sehingga pemerintah daerah sudah bisa melakukan inisiatif mengatur dirinya sendiri, selain itu sifat dan ciri khusus daerah juga sangat dihargai Semuanya itu dilaksanakan prinsip dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.⁹ Perubahan itu perlu dilakukan dan penyempurnaan dengan penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 sehingga dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak berlaku lagi.

Berhubungan dengan hal ini maka semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah otonom dan berkaitan dengan pemerintahan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan tetap berlaku. Tujuan dari perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui

⁹ Undang Nomor 22, "Tentang Pemerintahan Daerah,," in *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1999.

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Dasar hukum untuk badan perwakilan desa juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjawab unsur lain, yakni Badan Permusyawaratan tiyuh. Badan Permusyawaratan tiyuh berfungsi menetapkan peraturan tiyuh bersama kepala tiyuh, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan perwakilan tiyuh adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan badan perwakilan tiyuh dipilih dari anggota badan perwakilan tiyuh. Masa jabatan anggota badan perwakilan desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.¹⁰

Secara Undang-Undang dan pendapat teoritis telah dijelaskan sangat detail bahwa bagaimana peran atau fungsi dari Badan Perwakilan Tiyuh itu sendiri adalah sebagai wakil dari masyarakat tiyuh dalam menentukan, menetapkan dan bermusyawarah untuk penetapan peraturan tiyuh maupun kebijakan tiyuh dengan kepala tiyuh dan unsur-unsur tiyuh lainnya.

Islam salah satu yang menjadi dasar atau pedoman umat muslim untuk bermusyawarah ataupun menetapkan peraturan telah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 159:

فَإِمَّا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ قَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

¹⁰ Zuharaini, "Hukum Pemerintahan Desa" (IAIN Raden Intan, 2017).

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Al-Qur'an Surat Ali Imran: 159)¹¹

Badan perwakilan tiyuh merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dianggap sebagai "parlemen" nya tiyuh. Badan perwakilan tiyuh juga merupakan lembaga baru di tiyuh pada era otonomi daerah di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi keanggotaannya bukan berdasarkan penggolongan. Badan perwakilan tiyuh adalah Lembaga Permusyawaratan tiyuh yang berfungsi yang melekat padanya menjadikan badan perwakilan tiyuh sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat tiyuh, selain kekuasaan kepala tiyuh yang selama ini telah ada. Bahkan dengan fungsinya sebagai lembaga legislasi dan pengawas, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan.

Peraturan tiyuh, pelaksanaan Pembangunan tiyuh serta keputusan kepala tiyuh, kedudukan badan perwakilan tiyuh lebih kuat dibandingkan kepala tiyuh. Kedudukan yang kuat ini juga dapat dilihat dari tugas dan wewenang badan perwakilan tiyuh dan hak yang dimiliki, Badan perwakilan tiyuh antara lain meminta keterangan kepada Pemerintah tiyuh, yaitu Kepala tiyuh dan Perangkat tiyuh.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf AL- QUR'AN Dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2013).

Fungsi badan perwakilan tiyuh di tiyuh Panaragan, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Lampung belum berjalan dengan baik, Kurangnya keterbukaan informasi dalam penetapan peraturan tiyuh Panaragan, Sehingga dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya BPT yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat dalam hal pelaksanaan peraturan tiyuh belum terlaksana secara demokratis di wilayah perwakilan anggota BPT, yang mana aspirasi tersebut lebih menitikberatkan pribadi kelompok maupun golongan. badan perwakilan tiyuh di tiyuh Panaragan belum baik merupakan cermin tidak profesional dalam kepemimpinannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memecahkan masalahnya, melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Badan Perwakilan Tiyuh Dalam Penetapan Peraturan Tiyuh” (Studi di Tiyuh Panaragan, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Lampung).

C. Fokus Penelitian

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian dapat terarah dan untuk menghindari meluasnya cakupan penelitian. Berdasarkan itu Maka untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, peneliti membatasi masalah yaitu untuk menguji “Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Badan Perwakilan Tiyuh Dalam Penetapan Peraturan Tiyuh” (Studi di Tiyuh Panaragan, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, Maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Badan Perwakilan Tiyuh Sebagai Lembaga Legislatif dalam Menetapkan Peraturan Tiyuh di Tiyuh Panaragan?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Tentang Badan Perwakilan Tiyuh dalam Menetapkan Peraturan Tiyuh di Tiyuh Panaragan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* tentang peran badan perwakilan tiyuh dalam menetapkan peraturan tiyuh di tiyuh Panaragan, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Lampung.
2. Untuk mengetahui badan perwakilan tiyuh dalam menetapkan peraturan tiyuh di tiyuh Panaragan, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Lampung.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktir yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman terhadap masyarakat mengenai peran badan perwakilan tiyuh dalam menetapkan

Peraturan tiyuh, yang diharapkan mampu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam artian yang membangun tiyuh.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan memberi sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai proses penetapan peraturan tiyuh dan pengawasan pelaksanaannya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah penulis melakukan penelusuran kajian penelitian terdahulu koleksi Skripsi Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis menemukan penelitian dengan judul yang sama “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur) “. Namun, setelah melakukan pencarian secara online, penulis juga menemukan penelitian yang relevan dengan judul yang penulis angkat. Adapun penelitian yang relevan dengan judul yang penulis yakni sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Yan Patmawi Sakbar pada tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)” jurusan Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung memaparkan bahwa Dari hasil

penelitian yang penulis amati bahwa belum adanya calon perempuan dalam bursa pencalonan anggota BPD dikarenakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang adanya aturan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa dan tidak adanya perempuan yang mencalonkan diri ataupun ketersediaan untuk dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dari pandangan *Fiqh Siyasah* seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, di dalam pemilihan anggota BPD di desa Sumber Jaya tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pemilihan anggota BPD Desa Sumber Jaya belum sepenuhnya menjalankan aturan yang dibuat khususnya untuk keterwakilan perempuan, namun tidak melanggar aturan perundang-undangan karena aturan tersebut sebatas rekomendasi, dikarenakan tidak adanya pasal sanksi apabila tidak dilaksanakan.¹²

2. Penelitian dilakukan oleh Nabila Puspita, pada tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Fungsi Kepala Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”, jurusan Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung memaparkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengkoordinasikan

¹² Yan Patmawi Sakban, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa.¹³

3. Penelitian dilakukan oleh Risaatul Lailiyah, pada tahun 2013 yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi di Desa Sidoarjo)”, jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 3, Nomor 1, April 2013. Mengemukakan bahwa Tulisan ini menjelaskan tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Jati, desa Banjar Bendo dan desa Sumpat kecamatan Sidoarjo dalam memberdayakan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁴

¹³ Nabila Puspita, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan),” *UIN Raden Intan Lampung* (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁴ Risaatul Lailiyah, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Sidoarjo,” *AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (2013): 6.

Berdasarkan pembeda dari penelitian ini, dari penelitian terdahulu adalah, dari segi pembahasan penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasa tentang fungsi dan peran badan perwakilan tiyuh di tiyuh panaragan dan membahas tentang perangkat tiyuh dalam penetapan peraturan di tiyuh Panaragan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam mengumpulkan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian)

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁶ Metode deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan untuk menguji teori metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah Penelitian bertindak sebagai pengamat.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994).

¹⁶ Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.¹⁷ Penelitian informan yang diambil penulis yaitu Zaibun selaku kepala tiyuh Panaragan.

Selanjutnya teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan purposive sampling, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.¹⁸

Informan yang dipilih dalam wawancara penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: Sumber data dalam hal ini adalah informan, disini informan yang dimaksud dalam wawancara penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Ali Rohmansyah selaku ketua BPT di tiyuh Panaragan tiyuh sebagai informan utama untuk mengetahui proses peran badan perwalilan tiyuh dalam menyepakati penetapan peraturan di tiyuh.
- 2) Zaibun selaku kepala tiyuh Panaragan.

¹⁷ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

- 3) Tarmizi selaku kepala dusun 5 di Panaragan.
- 4) Dasuki yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan luas tentang bagaimana peran BPT yang di desa Panaragan.

Sedangkan dalam menentukan informan, menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data kedua ini adalah sumber data sekunder, dimana jenis sumber data ini menggunakan literature. Literatur yang digunakan adalah buku, Al-Qura'an, Hadits, dan undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus insiklopedia, internet, artiker, dan jurnal.

3. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample*, didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang di pilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).¹⁹ Informan ini dibutuhkan untuk

¹⁹ Ibid.

mengetahui kondisi yang sesuai dengan fenomena peran badan perwakilan desa dalam menetapkan peraturan di tiyuh panaragan.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.²⁰ Selanjutnya menurut Arikonto pemilihan sampel secara *purposive*, pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi.²¹

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang fenomena peran badan perwakilan desa dalam penetapan peraturan di desa panaragan maka penelitian memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai adalah Ali Rohmansyah adalah ketua BPT di desa panaragan. Selanjutnya informan kunci ini selanjutnya akan dilakukan

²⁰ Burhan Burgin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007).

²¹ S Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai peran badan perwakilan tiyuh dalam penetapan peraturan di tiyuh panaragan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Burhan bungin mengemukakan bahwa Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian.²² Hal ini diperlukan adanya teknik pengambilan data yang dapat digunakan secara cepat dan tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode lain dapat mempermudah penelitian ini. Berdasarkan penyusunan ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dari tahun 2013-2019 yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan), sudah tentu para peneliti, walaupun dibantu oleh banyak asisten yang dapat menggantikan observasi mereka secara bergiliran, karena kekurangan data yang di dapat dari observasi harus diisi dengan data yang didapatkan dari wawancara.²³

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan

²² Burhan Burgin, *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

langsung dan berhadapan. Wawancara atau interview adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang (*guide*) wawancara.²⁴

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan beberapa masyarakat Desa Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah. Kab.Tulang Bawang Barat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan data yang diperoleh lebih relevan. Wawancara ini telah penulis lakukan kepada saudara Zaibun, Ali Rohmansyah, Tarmizi, dan Dasuki.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.²⁵ Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

Penelitian observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung dengan melihat, mengamati sendiri kejadian bagaimana peran badan perwakilan tiyuh dalam penetapan peraturan di tiyuh panaragan. Peneliti juga mencatat perilaku dan kejadian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik di dalam proses kegiatan maupun diluar kegiatan.

c. Dokumentasi

²⁴ Burhan Burgin, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).

²⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.²⁶ Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk kejadian yang pernah ada di desa Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah. Kab. Tulang Bawang Barat. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam. Kumpulan data dalam bentuk tulisan ini di sebut dokumen dalam arti luas termasuk monument, artefak, foto, CD, *harddisk*, *flashdisk*, dan sebagainya.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁷
- b. Rekontruksi data (*rekontruicing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah di pahami.
- c. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²⁸

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011).

²⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Lampung, 2015).

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Setelah data terkumpul, dikoreksi, dievaluasi dan diolah yang sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur sehingga menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

6. Metode Analisa Data

Analisis data Kualitatif adalah upaya mengelola data dengan mengumpulkan data, memilih-milih dan menentukan pola (finding a patter), menentukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (verification), dan memutuskan kesimpulan (tentative conclusion).²⁹

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu metode dalam mengelola data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisis data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dari verifikasi.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilah data pokok yang paling penting yaitu yang berkaitan dengan focus tema penelitian. Kemudian data tersebut disusun sistematis agar mudah untuk dipahami sehingga pemahaman

²⁹ Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).

ini akan membantu menjawab pertanyaan baru yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu:

- 1) Bagaimana fenomena peran badan perwakilan tiyuh dalam penetapan peraturan di tiyuh panaragan.
- 2) Bagaimana motif terjadi ketidak sinambungan antara BPT dengan masyarakat dalam masalah demokrasi di tiyuh.

b. Data display/penyajian data

Data display adalah data yang telah mengalami proses reduksi yang lengkap selanjutnya adalah melakukan penyajian data, Penelitian ini kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun diagram. Tujuan penyajian data disini adalah untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipahami tersebut. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian.

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan didasarkan kesimpulan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan.

7. Teknik Keabsahan Data

Semua data yang diperoleh dari lapangan yang telah dipisahkan kemudian disusun untuk mencari pola, hubungan dari kecenderungan hingga sampai pada tahap kesimpulan. Untuk memperkuat kesimpulan dari penulis diperoleh verifikasi ulang untuk menambahkan data baru yang mendukung kesimpulan tersebut sehingga kesimpulan akan menjadi data yang valid. Proses ini dalam bahan bacaan atau literature review dapat membantu peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang valid berkaitan dengan hasil data yang diperoleh dari lapangan dengan triangulasi data.

Triangulasi data dalam pengujian Kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiyono memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian.³⁰

Penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data teknik dimana peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (informan), sehingga data tersebut bias dinyatakan benar (valid) dan juga melakukan observasi serta dokumentasi diberbagai sumber.

I. Sistematika Pembahasan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010).

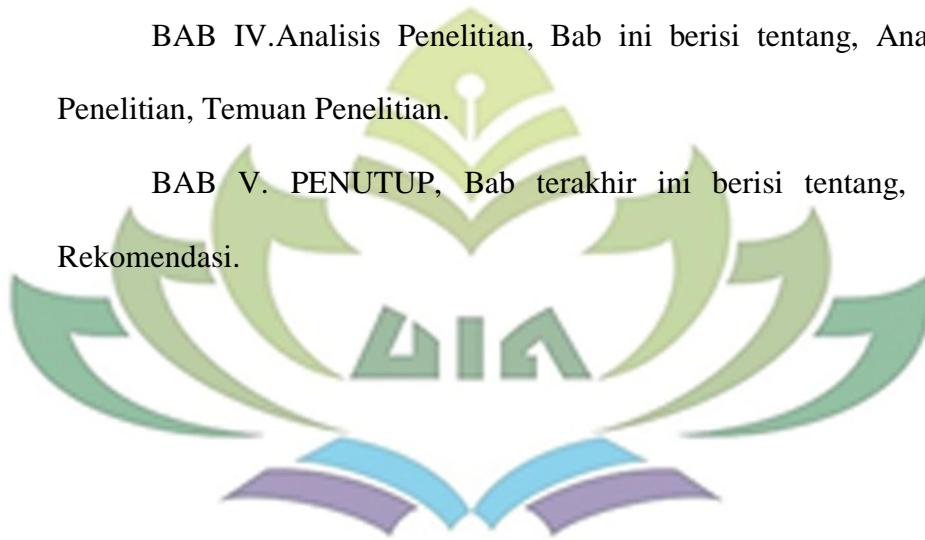
BAB I. PENDAHULUAN, BAB ini berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Penentuan Informan, Teknik Keabsahan Data, Sistematika Pembahasan.

BAB II. Landasan Teori

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian, Bab ini berisi tentang, Gambaran Umum Obyek Penelitian, Penyajian Fakta dan Data Penelitian.

BAB IV. Analisis Penelitian, Bab ini berisi tentang, Analisis Data Penelitian, Temuan Penelitian.

BAB V. PENUTUP, Bab terakhir ini berisi tentang, Simpulan, Rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah*

Lembaga kepala negara dan pemerintahan atau kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan negara menurut umat Islam adalah wajib menurut ijma'. Akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan. Kemudian salah satu diskursus penting yang tidak pernah kering diperbincangkan banyak ulama adalah bentuk pemerintahan dalam Islam. Kondisi seperti ini, masing-masing pihak memiliki argumentasi dan pendapat berbeda-beda. Ini menunjukkan betapa kaya dan beragam khazanah keilmuan yang dimiliki oleh dunia Islam.

Ulama yang memberikan komentar terhadap agama dan daulah adalah Taqiyuddin Ibnu Taymiyah (1263-1328) dalam risalahnya *al-Siyasah al-Syar'iyah* (Pemerintahan Syariat). Ibnu Taymiyah menegaskan, bahwa tujuan kekuasaan adalah memperbaiki agama, manusia dan mengatur urusan dunia yang tanpanya agama tidak sempurna. Bahkan lebih menurutnya, agama tidak akan tegak tanpa kekuasaan.³¹ Membangun dan mendirikan kekuasaan adalah kewajiban

³¹ Ibnu Taymiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fī Iṣlāhi Al-Ra'ī Wa Al-Rā'iyah* (Dār al-Ma'rifah, 1969).

Agama yang paling luhur. Tujuannya mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat.



Agama dan negara, ibarat sekeping uang logam yang sisi-sisinya saling melengkapi. *Qawwamū al-dīn bi al-sāif wa al-muṣḥaf*, tegas Ibnu Taymiyah. Maksudnya, agama tidak akan bisa tegak kecuali dengan mushaf (AL-Qur'an dan AL-Hadīṣ) serta pedang (kekuasaan).³²

Kekuasaan dalam pandangan Ibnu Taymiyah semacam alat atau eksekutor untuk memuluskan kepentingan dan tujuan agama, mulai dari persoalan-persoalan privat, seperti ṣalat, haji, zakat, hingga urusan publik, seperti hudud, pajak, hingga menyangkut pertahanan dan keamanan negara (jihad).

Ibnu Taymiyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian: legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*), eksekutif (*al-sulṭah al-Tanfiziyyah*), dan yudikatif (*al-sulṭah al-qadā'iyah*). Model pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang (penguasa otoriter).³³ Ibnu Taymiyyah hanya mengenal seorang pemimpin yang memiliki otoritas tunggal, seperti yang terjadi pada masanya.

1. *Al-Sulṭah al-Tasyri'iyah*

Kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *alsulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan

³² Ibid.

³³ Ibid.

diberlakukan bagi umat Islam. Wacana *Fiqh siyasah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah alqada'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Sedangkan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.³⁴ Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

³⁴ Nur Rahma Diyani, "Kependudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam AL-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua *syariat* Islam tersebut. Perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara.

Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

2. *Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir,' dan wizarah/wāzīr.

a. Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Sedangkan bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus *Munawwir*, imamah bermakna imam atau pemimpin. Akar kata itulah muncul perkataan imamah.

Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.³⁵ AL-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam (QS. Al-anbiya': 73).

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah. (QS. Al-anbiya' - 73)³⁶

Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam *khilafah* yang harus dipegang oleh salah seorang

³⁵ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qoda'iyah," *Jurnal Legislatif, Eksekutif, Yudikatif* 13, no. 1 (2017): 159.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf AL- QUR'AN Dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2013).

imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi *khalifah*, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.³⁷

Sedangkan di sinilah awal munculnya benih-benih perbedaan yang menjadi dua kelompok besar yaitu *Sunni* dan *Syi'ah*. Kelompok Sunni percaya bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedang *Syi'ah* percaya secara definitif harus terdiri dari 12 orang keturunan Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib yang menjabat sekitar 17 Maret 599 M-28 Februari 661 H adalah *khalifah* yang keempat dan terakhir bagi kelompok sunni, tetapi yang pertama bagi *Syi'ah*. *Syi'ah* sekarang ini, khususnya aliran *isnā asy'ariyyah* banyak berkembang di Iran, Iraq dan Lebanon. Setelah Imam yang kedua belas, konsep kepemimpinan *Syi'ah* tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul istilah *Wilayat Faqh* yang diderivasi oleh Imam Khomeini sehingga menghasilkan revolusi 1979 di Iran. *Syi'ah* 12 berpendapat bahwa setelah ghaibnya imam mereka yang kedua

³⁷ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: AL-Saufa, 2014).

belas, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sarjana, mujtahid, dan Ayatullah sehingga sang imam muncul kembali.

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Allamah mauḍu'atu lī khilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasiyyah al-dunyā*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan ijma' (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal. Alasannya firman Allah swt, QS.Al-Nisa'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Nisa' /4: 59)³⁸

Sedangkan pemilihan pemimpin sebagai kekuasaan kepala negara hendaklah melalui jalur khusus yakni:

³⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf AL- QUR'AN Dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2013).

1) Pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem perwakilan melalui lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* (semacam MPR) maupun ahl al-Syura atau tim formatur kecil. Cara ini disebut dengan sistem kontrak sosial, yang melahirkan kewajiban dan hak kepala Negara disatu pihak serta kewajiban dan hak rakyat di pihak lain. Teori al-Mawardi ini jelas bertentangan dengan pandangan *Syi'ah* yang menyatakan bahwa jabatan imam ditetapkan atas dasar nass (penetapan oleh Tuhan dan Nabi) atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya dari keluarga ahl al-ba'it. Pemilihan imam dipandang al-Mawardi sebagai kewajiban sosial atau bersama (*fadhu kifayah*), seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Konsep membentuk lembaga imamah dan pemilihan imam menyerupai konsep “kontrak” yang melibatkan dua pihak yaitu imam (*ahlimamah*) dan rakyat atau pemilih (*ahl al-ikhtiyar*), atau *ahl al-hall wa al-'aqd* (orang yang mengurai atau mengikat/lembaga pemilih). Menurutny pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang mempunyai rasa ('adalah), mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan (kearifan), sehingga mampu memilih kepentingan

orang banyak. Disamping itu masalah pemilihan imam, *ahl al-hall wa al-aqd* juga harus mempertimbangkan, kemungkinan calon yang mereka pilih memperoleh persetujuan sebagian besar rakyat. Setelah ahl ikhtiyar memperoleh keputusan mengenai calon imam dan ia wajib menerima kedudukan itu, maka menjadi tugas dan kewajiban rakyat untuk menyampaikan *bay'ah* dan mematuhi. Singkatnya fungsi *ahl-akhtiyar* adalah mengidentifikasi orang yang akan di angkat sebagai imam.

2) Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang disebut suksesi yang didasarkan pada kepemimpinan Umar bi al-Khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Namun dalam pandangan al-Mawardi kepala Negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.³⁹

Al-Mawardi seperti dikutip oleh Dedi Supriyadi menjelaskan, bahwa boleh suksesi tanpa pertimbangan dari *ahlu al-ikhtiyar*, asalkan calon penggantinya bukan ayahnya atau anak laki-lakinya. Dalam hal ini disebutkannya tiga pendapat, yakni:

- 1) Pertama bahwa seorang imam harus berkonsultasi dengan *ahl al-ikhtiyar*, meskipun adalah ayah atau anak laki-lakinya.
- 2) Kedua, membatasi konsultasi pada kasus dimana sang calon adalah putra imam.

³⁹ Yusuf Qardawi, *Min Fiqhi Al-Daulah Fi Al- Islām*, ed. Kathur Suhardi (Jakarta: Al-Kausar, 1998).

3) Ketiga, tidak mengharuskan imam untuk berkonsultasi dalam kasus kedua tersebut.⁴⁰

Menurut al-Mawardi, seorang imam atau calon imam harus memenuhi/memiliki tujuh persyaratan:

- 1) Rasa keadilan ('adālah);
- 2) Pengetahuan ('ilm);
- 3) Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan;
- 4) Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;
- 5) Berwawasan luas;
- 6) Punya keberanian untuk melindungi wilayah (otoriti) Islam dan melaksanakan jihad;
- 7) Punya garis keturunan dari *Quraisy*

Syarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis modern, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persamaan hak sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunan. Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri diakui oleh kaum *Sunni* tidak pernah menyatakan dengan tegas siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin umat. Sementara dua penyebab gugurnya kontrak antara imam dan rakyat meskipun masih menjabat, menurut al-Mawardi adalah jika imam

⁴⁰ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasa: Konsep, Aliran Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

berlaku tidak adil dan imam mengalami cacat fisik. Hal itu terjadi maka harus dilakukan pemilihan imam baru dengan kontrak yang baru pula.

Doktrin *al-Asy'ari* membolehkan adanya dua imam pada waktu bersamaan asal wilayah kekuasaannya terpisah jauh. Namun al-Mawardi dengan tegas menolak pendapat ini, didasarkan pada argument keagamaan, sebab *bay'ah* hanya bisa diberikan kepada satu orang pada waktu yang sama. Jika kemudian dilakukan *bay'ah* terhadap orang lain, maka kontrak yang kedua menjadi batal, sebagaimana berlaku dalam pernikahan. Ketidaksetujuan ini didasarkan pertimbangan politik, dimana masa itu *Abbasiyah* menghadapi tantangan dari dinasti *Fatimiyah* yang berkuasa di yang bermazhab *Syi'ah Ismailiyah*.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:

- 1) Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal;
- 2) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.
- 3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya.
- 4) Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan.

- 5) Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh.
- 6) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-ḡimmah* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
- 7) Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut *syari'ah* maupun yang wajib menurut *ijtihad*.
- 8) Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal*, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)
- 9) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya.
- 10) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinnya. Tetapi jika tidak, maka sangat memungkinkan terjadinya pemberhentian imam dari jabatannya.

- 1) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas umum/para menteri (*wāzīr*), tugas mereka mewakili imam dalam semua urusan tanpa pengecualian.
- 2) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus/para pemimpin wilayah (*āmīr*).
- 3) Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para hakim kepala (*qāḍī alquḍāt*), pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah perbatasan, direktorat, penanggungjawab pajak dan penanggungjawab zakat. Tugas mereka masing-masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas.
- 4) Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan komandan militer daerah.

b. Konsep *Khalifah/Khilafah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan AL-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara

Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimīn*.⁴¹ *Khalifah* dan *khilafah* itu hanya terwujud bila:

- 1) Seorang *Khalifah* saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. *Khalifah* tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).
- 2) Wilayah yang menjadi tanah air (waṭan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
- 3) Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari *Syariat* Islam yang bersumberkan dan berdasarkan AL-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. Seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.
- 4) Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada *Khalifah* (pemimpin tertinggi) dan *Khilafah* (sistem pemerintahan Islam).
- 5) *Khilafah* yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi *Khalifah* atau kelompoknya, melainkan untuk

⁴¹ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qoda'iyah," *Jurnal Legislatif, Eksekutif, Yudikatif* 13, no. 1 (2017): 163.

kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi.

Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkām Al-Sulṭaniyyah* mengemukakan, bahwa objek imāmah (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan *khilafah* nubuwwah (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam.⁴²

a. Syarat-syarat sebagai Khalifah

Khalifah itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam, maka para ulama, baik salaf (generasi awal Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa seorang Khalîfah itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Syarat atau kriteria yang mereka jelaskan itu berdasarkan petunjuk AL-Qur'an, Sunnah Rasul Saw. Praktek sebagian Sahabat, khususnya Khulafaur al-rasyidîn setelah Rasul saw, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, raḍiyallahu ‘anhum ajma’in.

⁴² Sartika, “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa.”

Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud al-Syanqiti, paling tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang *Khalifah*:

- 1) Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan kebersihan akidahnya.
- 2) Laki-Laki, Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul Saw bersabda: “*Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra-atun* (Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin).”
- 3) Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apa lagi memimpin orang lain.
- 4) Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan.
- 5) Sampai ke derajat Mujtahid. Karena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat Mujtahid tentang Islam.
- 6) Adil, Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji

kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang zalim.

7) Profesional (amanah dan kuat). *Khilafah* itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari'atkan seperti menegakkan Agama Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi *Khalifah*. Sebab itu, Imam Ibnu Badran ra., bahwa pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan *syar'ait* Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang dizalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden. Ibnu Badran menjelaskan, bahwa mana mungkin orang-orang seperti itu menjadi *Khalifah*, sedangkan mereka dalam tekanan Taghut (Sistem *Jahiliyah*) dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan para pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas

pemimpin kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah umat Islam, tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan taat *fi al-mansyat wa al-makrah* dalam situasi mudah dan situasi sulit), kendati digelari dengan *Khalîfah*.

8) Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak sah kepemimpinannya, karena bagaimana mungkin orang seperti itu mampu menjalankan tugas besar untuk kemaslahatan agama dan umatnya, Untuk dirinya saja memerlukan bantuan orang lain.

9) Pemberani, Orang-orang pengecut tidak sah jadi *Khalîfah*. Bagaimana mungkin orang pengecut itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap agama Allah dan urusan Islam dan umat Islam. Dijelaskan Umar Ibnul Khattab saat beliau berhaji: “Dulu aku adalah pengembala onta bagi Khattab (ayahnya) di Dhajnan. Jika aku lambat, aku dipukuli, ia berkata: Anda telah menelantarkan (onta-onta) itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata: Anda tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku telah bebas merdeka di pagi dan di sore hari. Tidak ada lagi seorangpun yang aku takuti selain Allah.”

10) Dari suku *Quraisy*, yakni dari puak Fihir Bin Malik, Bin Nadhir, Bin Kinanah, Bin Khuzai'ah. Para ulama sepakat, syarat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Jika tidak terpenuhi, maka siapapun di antara umat ini yang memenuhi persyaratan, maka ia adalah yang paling berhak menjadi *Khalîfah*.⁴³

c. Sistem Pemilihan *Khalîfah*

Sejarah umat Islam, khususnya sejak masa *Khulafāu al-rāsyidîn* sepeninggalan sistem *Nubuwahdi* bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, sampai jatuhnya *Khilafah* Utsmaniyah di bawah kepemimpinan *Khalîfah* Abdul Hamid II yang berpusat di Istanbul, Turki tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan *Khalîfah*.⁴⁴ Pertama, dengan sistem *Wilayat al-'Ahd* (penunjukan *Khalîfah* sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar.

Kedua, dengan sistem *syura*, sebagaimana yang terjadi pada *Khalîfah* Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh *Majlis Syura*. Sedangkan anggota *Majlis Syura* itu haruslah orang-orang yang shaleh, *faqih*, *wara'* (menjaga diri dari *syubhat*) dan berbagai sifat mulia lainnya. Pemilihan itu *Khalifah* itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang

⁴³ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara Dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2001).

⁴⁴ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Saufa, 2014).

memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan seterusnya.⁴⁵ Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan seorang *Khalifah* haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang *Khalifah* terpilih, umat wajib berbai'ah kepadanya. Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian *Khalifah* di zaman *Umayyiah* dan *Abbasiyah*. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil *Syar'i* dan praktek *Khulafāu al-rasyidīn*.

d. Tugas dan Kewajiban *Khalifah*

Tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir.

⁴⁵ Ibid.

Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-‘alamin*). Secara umum, tugas *Khalîfah* itu ialah:

- 1) *Tamkin Dinillāh* (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.
- 2) Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
- 3) Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik.
- 4) Menerapkan undang-undang yang ada dalam AL-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul saw., dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun.
- 5) Berjihad di jalan Allah.

e. Konsep Imarah/'āmir'

Term Imarah merupakan *maṣḍar* dari āmira yang berarti *ke'āmiraan* atau pemerintahan. Kata āmir bermakna pemimpin. Istilah āmir di masa Rasul dan Khulafa urrasyidīn digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmīr al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan

penting, seperti Amīrul Mukminīn, Amīrul Muslimīn, Amīr al-Umarā. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, āmir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata āmir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai šaqifah Bani Sa’idah. Gelar *āmirul Mukminīn* diselamatkan pertama kali kepada *khalifah* Umar bin Al-Khattab. Pada era *Abbasiyah* banyak āmir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti Tulun.⁴⁶

f. Wizārah/Wāzir

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja’*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari wāzir, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan wāzir seperti badan dengan punggungnya.⁴⁷

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur’an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wāzir bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Mu’jām Al - Masā’id Al- Kitāb Al - ‘Arabī Baina Yadayik* (Malang, 2012).

imamah juga boleh. Menurutny ada dua macam wizarah (kementrian) yakni:

1) *Wizārah al-Tafwīd* (Kementrian Delegatori)

Wāzir oleh imam diserahi tugas/wewenang tentang pengaturan urusanurusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijihad para wāzir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak manangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan wāzir, kecuali tiga hal, penentuan putra mahkota, imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wāzir, sementara wāzir tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Syarat yang harus dipenuhi wāzir adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.

2) *Wizārah al-Tanfīz* (Kementrian Pelaksana)

Wāzir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara Ia tidak mempunyai wewenang apapun.

Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewāziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang ‘wāzīr’ model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh *khalifa*, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Ada beberapa perbedaan antara wāzīr tafwīd dengan wāzīr tanfīz, yakni:

- 1) *wāzīr tafwīd* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus kezaliman.
- 2) *wāzīrtafwīd* bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah)
- 3) *wāzīrtafwīd* bisa memimpin tentara dan mengurus perang.
- 4) *wāzīrtafwīd* bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di *bait al-mal*.⁴⁸

Tiga wewenang ini tidak dimiliki oleh wāzīr tanfīz.

Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan

⁴⁸ Taymiyyah, *Al-Siyasah Al- Syar'iyah Fī Iṣlāhi Al - Ra'ī Wa Al - Rā'iyah*.

syarat yang harus dipenuhi *wāzirtafwīd*, yakni: *wāzirtafwīd* haruslah seorang yang merdeka, *wāzirtafwīd* harus memiliki pengetahuan tentang syari'at, *wāzir tafwīd* harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.⁴⁹

Selain itu baik *wāzir tafwīd* maupun *wāzir tanfīz*, memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama. Menurut al-Mawardi, seorang khalifah (imam) bisa mengangkat dua orang *wāzir tanfīz*, secara bersamaan baik waktu maupun tempat.

3. *Al-Sulṭah al-Qaḍā'īyyah*

Kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Sedangkan dalam konsep *Fiqh Siyasaḥ*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut *Sulṭah Qaḍā'īyyah*.

Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin

⁴⁹ Ibid.

terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara.

Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga 'AL-Qaḍā' tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (AL-Qaḍā) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah Qaḍā, Wilayah Maḥalim, dan Wilayah Hisbah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulṭah al-tasyri'iyyah* (kekuasaan legislatif), *Sulṭah al-ṭanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *Sulṭah al-Qaḍā'iyyah* (kekuasaan yudikatif).

Sedangkan dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of power). Sedangkan dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan AL-Qur'an dan al-Hadis Nabi Muhammad saw. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam AL-Qur'an dan

al-Hadis, sedangkan eksistensi Hadis merupakan penjelasan tentang AL-Qur'an.⁵⁰

Tugas *al-Sulṭah al-Qaḍā'īyyah*, adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qaḍā* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁵¹

Untuk melaksanakan fungsi negara, dibentuk alat-alat perlengkapan negara. Jumlah kedudukan, kekuasaan dan wewenang masing-masing negara tidak sama. Alat kelengkapan Negara Republik Indonesia dengan menganut teori “pemisahan kekuasaan” (Separation of Power), dengan prinsip check and balances sebagai ciri pelekatnya. Maka dengan teori ini, dikenal dengan tiga lembaga Negara sebagai alat kelengkapan Negara,

⁵⁰ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996).

⁵¹ HR Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007).

yaitu Lembaga Legislatif terdapat DPR dan DPD, Lembaga Eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden dan Lemabaga Yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan sebagai pengawasan keuangan ada BPK.⁵²

Lembaga yudikatif memiliki wewenang judisial yang bertugas menjalankan wewenang kehakiman, baik di lapangan hukum publik (pidana, administrasi negara) dan dilapangan hukum privat (perdata, dagang), baik dikalangan sipil maupun militer. Ketentuan dasar mengenai organ dan wewenang kehakiman, umumnya terdapat dalam UUD 1945. Misalnya dalam bab IX UUD 1945 yang berjudul “Kekuasaan Kehakiman” yaitu Pasal 24:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
- c. Badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

B. PemerintahanDesa

⁵² Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti negari, kampung, pekon, huta, bori dan marga. Pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa ditetapkan dalam peraturan Desa dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi dan lain-lain. Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan kepada taat aturan yang menjadi dasar peraturan kehidupan masyarakat, Desa dipahami sebagai satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk dan terkesan kuat bahwa kepentingan dan bagi kebutuhan masyarakat Desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan dari pihak luar⁵³

Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung dibawah Kecamatan sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan⁵⁴, bahwa Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian

⁵³ Khairudin, "Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" (IAIN Raden Intan Lampung, 2004).

⁵⁴ Sudirwo Daeng, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa* (Bandung: Angkasa, 1991).

dengan posisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa berada di bagian yang langsung berbaur bersama masyarakat, maka di mata masyarakat aparatur pemerintahan Desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara ketentraman dan kesejahteraan. Tingkah laku dan perbuatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipandang kurang pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat.⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan pengaturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

⁵⁵ Khairudin, "Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektifitas dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.

- i. Kearifan local adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan umum.
- j. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.⁵⁶

2. Perangkat Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, tenaga-tenaga yang mengisi jabatan-jabatan yang tersedia di dalam organisasi pemerintahan desa. Beberapa jabatan ada struktural di lingkungan pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsure pembantu Kepala Desa terdiri dari:

- a. Sekertaris desa yang dipimpin oleh Sekertaris Desa.
- b. Pelaksanaan kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proposional.
- c. Pelaksanaan teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.⁵⁷

Pengangkatan Perangkat Desa dijelaskan dalam pasal 64

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

⁵⁶ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁵⁷ Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa* (Bandar Lampung: Sai Wawai, 2016).

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yaitu sebagai berikut:

1. Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
2. Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.⁵⁸

Pasal 66 dan Pasal 67 juga mengatur tentang pengangkatan perangkat Desa yaitu sebagai berikut:

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. K
Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa.
- b. K

⁵⁸ Ibid.

epala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa.

c. C

amat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.

d. R

ekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 67 juga mengatur tentang pengangkatan perangkat Desa

- a. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- b. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁵⁹

Pemberhentian Perangkat Desa diatur juga dalam Pasal 68 dan Pasal 69 yaitu sebagai berikut:

- a. Perangkat Desa berhenti karena:

⁵⁹ Ibid.

- 1) Meninggal dunia.
 - 2) Permintaan sendiri.
 - 3) Diberhentikan.
- b. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C karena:
- 1) Usia telah 60 (enam puluh) tahun.
 - 2) Berhalangan tetap.
 - 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa.
 - 4) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69, Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. K
Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa.
- b. C
Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- c. R
Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.⁶⁰

⁶⁰ Ibid.

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang bersumber dari APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan yang didanai oleh APB Desa, dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui ADD.⁶¹

C. Fungsi BPT

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pembentukan bangsa Sama halnya seperti pada saat Indonesia, dalam membentuk dan menyusun suatu Negara bukan merupakan atas

⁶¹ Ibid.

kualitas manusia sebagai makhluk pribadi yang bebas, tetapi suatu proses kehendak bersama untuk menyusun suatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sudah mengenal demokrasi atau musyawarah dengan baik.⁶² Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diartikulasikan oleh BPT dan lembaga masyarakat lainnya. Kedudukan BPT dalam struktur Pemerintahan tiyuh adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili Warga tiyuh dalam Pemerintahan tiyuh.

BPT juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Menyelenggarakan pemerintahan tiyuh terdapat dua lembaga pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan tiyuh, sedangkan BPT berfungsi menetapkan peraturan tiyuh bersama kepala tiyuh, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota BDT adalah wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPT terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau

⁶² Rudi Santoso, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tatanegara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Jurnal Nizham* 8, no. 1 (2020): 126.

pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPT adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPT ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan tiyuh.

Pimpinan BPT terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPT dipilih dari dan oleh anggota BPT secara langsung dalam rapat BPT yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPT untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan di bantu anggota termuda.

BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dalam pasal 55 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan tentang fungsi BPD tetapi BPD sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menjelaskan tentang BPD didalam Peraturan. Fungsi BPD adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁶³

⁶³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110, “Badan Permusyawaratan Desa,” in *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2016.

Adapun Mekanisme dalam menetapkan peraturan tiyuh adalah beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPT dalam menetapkan Peraturan tiyuh yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPT maupun Kepala tiyuh dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan tiyuh. Setelah itu, usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan tiyuh. Dalam tahap pembentukan Peraturan tiyuh, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala tiyuh dibandingkan dari pihak BPT. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPT yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala tiyuh yang terpilih sudah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah, (3) Pengawasan, Kepala tiyuh di dalam melaksanakan pemerintah tiyuh juga berhak untuk membuat keputusan Kepala tiyuh.

Keputusan Kepala tiyuh dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan tiyuh. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala tiyuh, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala tiyuh antara lain adalah keputusan Kepala tiyuh tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala tiyuh yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes).

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan tiyuh terhadap keputusan Kepala tiyuh yaitu sebagai berikut, Melihat proses

pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut, Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes, Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak, Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan, Menindak lanjuti apabila dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan, Fungsi sebagai pengawas BPT dituntut lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam tiyuh tersebut, Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan tiyuh (BPT) di tiyuh. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan tiyuh, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.⁶⁴

Proses pengambilan keputusan didesa ada dua macam keputusan, Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif dijelaskan

⁶⁴ Ainun Mardiyah, "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa," *Jurnal ilmu pemerintahan* 12, no. 2 (2019): 113.

terlebih dahulu oleh para tokoh tiyuh. Bentuk keputusan kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan tiyuh yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan tiyuh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dari uraian di atas, diduga timbulnya fenomena tersebut dikarenakan terkadang fungsi Badan Permusyawaratan tiyuh untuk mengayomi adat istiadat setempat kurang diperhatikan karena lebih mengutamakan fungsi legislasi dan anggaran Aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan Badan Permusyawaratan tiyuh belum representatif. Permasalahan-permasalahan tersebut, ternyata belum optimalnya tingkat penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis ini berkenaan dengan beberapa fungsi Badan Permusyawaratan tiyuh yang belum dilaksanakan secara maksimal.

Badan Permusyawaratan tiyuh (BPT) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur

penyelenggara desa. Keberadaan BPT dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Mencermati fungsi BPT khususnya dalam hal legislasi di desa, maka dapat dikatakan bahwa BPT memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di tiyuh. BPT secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat tiyuh.⁶⁵



⁶⁵ Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas and Walid Mustafa Sembiring, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa," *Jurnal Ilmu pemerintahan dan social politik* 4, no. 2 (2016): 167–175.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: AL-Saufa, 2014.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Agama, Negara Dan Penerapan Syariah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2001.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Burgin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Burhan Burgin. *Metode Penelitian Social*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Daeng, Sudirwo. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Dasuki. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Panaragan*. Lampung, 2020.
- Dedi Supriyadi. *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Diyani, Nur Rahma. "Kependudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah." *Universtias Islam Negeri Raden Intan*

Lampung, 2019.

- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Iqbal, Hakim Javid. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Jamil, Akhmad Sobrun. ““Al-‘Adalah, Kesejahteraan Masyarakat Di Negara-Negara Islam.” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 6.
- Kaelan MS. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kemendagri nomor 110. “Badan Permusyawaratan Desa.” In *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Mushaf AL- QUR’AN Dan Terjemah*. Bandung: Cordoba, 2013.
- Khairudin. “Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” IAIN Raden Intan Lampung, 2004.
- kkbi. “Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi.” *Kkbi.Web.Id*. Last modified 2008. Accessed June 21, 2021. <https://kkbi.web.id/peranan>.
- Lailiyah, Risaatul. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Sidoarjo.” *AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (2013): 6.
- Mardiyah, Ainun. “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa.” *Jurnal ilmu pemerintahan* 12, no. 2 (2019): 113.
- Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ngarsiningtyas, Situ Khoiriyah, and Walid Mustafa Sembiring. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa." *Jurnal Ilmu pemerintahan dan social politik* 4, no. 2 (2016): 167–175.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110. "Badan Permusyawaratan Desa." In *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2016.
- Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Mu'jām Al - Masā'id Al- Kitāb Al - 'Arabī Baina Yadayik*. Malang, 2012.
- Puspita, Nabila. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)." *UIN Raden Intan Lampung*. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Qardawi, Yusuf. *Min Fiqhi Al-Daulah Fi Al- Islām*. Edited by Kathur Suhardi. Jakarta: Al-Kausar, 1998.
- RI, Kementerian Agama. *Mushaf AL- QUR'AN Dan Terjemah*. Bandung: Cordoba, 2013.
- Ridwan, HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007.
- Rohmansyah, Ali. *Wawancara Dengan Ketua BPD Desa Panaragan*. Lampung, 2020.
- Sakban, Yan Patmawi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)." *UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

La Samsu. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qoda'iyyah." *Jurnal Legislatif, Eksekutif, Yudikatif* 13, no. 1 (2017): 159.

Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qoda'iyyah." *Jurnal Legislatif, Eksekutif, Yudikatif* 13, no. 1 (2017): 163.

Santoso, Rudi. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tatanegara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)." *Jurnal Nizham* 8, no. 1 (2020): 126.

Sarman, Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sartika, Lia. "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 164.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Suryadi, Bambang. *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*. Bandar Lampung: Sai Wawai, 2016.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Lampung, 2015.

Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Tarmizi. *Wawancara Dengan Kepala Dusun 5 Desa Panaragan*. Lampung, 2020.

Taymiyyah, Ibnu. *Al-Siyasah Al- Syar'iyyah Fī Iṣlāhi Al - Ra'ī Wa Al - Rā'iyyah*. Dār al- Ma'rifah, 1969.

Undang Nomor 22. "Tentang Pemerintahan Daerah." In *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1999.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zaibun. *Wawancara Dengan Kepala Desa*. Lampung, 2020.

Zuharaini. "Hukum Pemerintahan Desa." IAIN Raden Intan, 2017.

